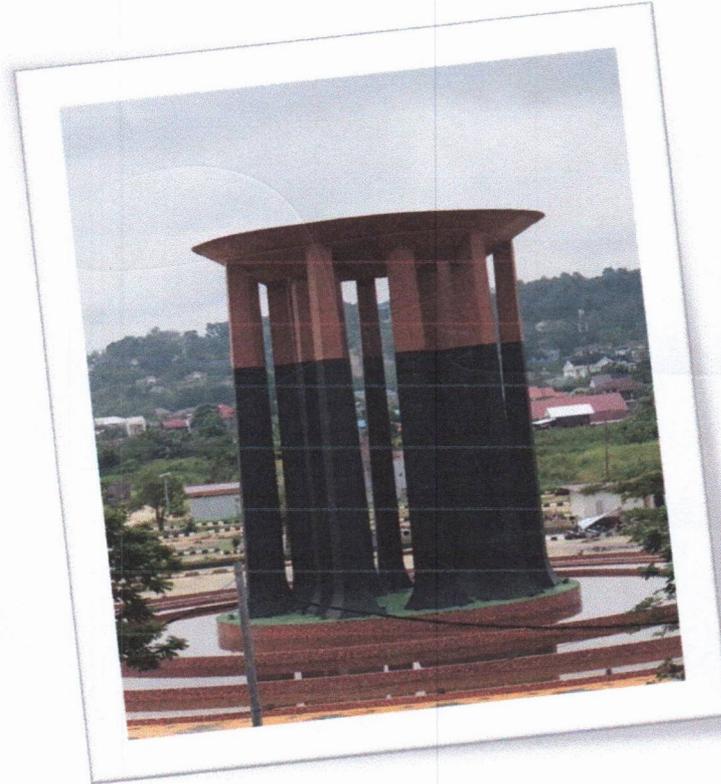




**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PARIWISATA**



**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO UPR
ESELON II PLT. KEPALA DINAS PARIWISATA
TRIWULAN I TAHUN 2024**

KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG D LANTAI 3

JL. WOLTER MONGINSIDI Tenggarong Kode Pos 75511 Telp (0541) 6669034, Fax (0541) 6667139

Website : <http://www.disbudpar.kutaikartanegarakab.go.id> – visitingkutaikartanegara.com

Email : disparkukar@gmail.com

TENGGARONG



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PARIWISATA

Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung D Lantai 3 Jalan Wolter Monginsidi
Kelurahan Timbau Tenggara Kode Pos.75515

Website : <https://dispar.kukarkab.go.id> – visitingkukarkartanegara.com

LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018 Pasal pada pasal 13 disebutkan pada ayat (1) “ Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko; (2) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas; a) identifikasi Risiko, dan analisis Risiko; (3) Dalam rangka Penilaian Risiko Sebagaimana pada ayat (1); Pimpinan Instansi Menetapkan: a) Tujuan Instansi pemerintah; b) Tujuan pada tiap tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan penilaian risiko dan telah menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Risiko Tahun 2023.

Hasil penilaian risiko dan RTP Risiko tersebut, disusun berdasarkan sasaran strategis dan operasional perangkat daerah sesuai dengan bisnis proses pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Penilaian Risiko dilakukan dengan mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran strategis, sasaran program dan kegiatan. Hasil identifikasi kemudian dianalisis dan ditentukan tingkat risikonya serta menentukan prioritas, perlakuan dan menyusun Rencana Tindak pengendalian Risiko (RTP) yang akan dilaksanakan. selanjutnya disusun Rencana Tindak pengendalian Risiko serta pemantauan yang akan dilaksanakan selama tahun 2024.

Penilaian Risiko dan RTP Risiko yang telah disusun, selanjutnya akan menjadi panduan setiap Unit Pengelola Risiko (UPR) dan Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga dapat mengoptimalkan pencapaian tujuan, sasaran strategis dan sasaran program dan kegiatan yang ingin dicapai. Hasil pelaksanaan Penilaian Risiko yang telah disusun, akan menjadi bagian terintegrasi dalam bisnis proses dan sebagai pertimbangan dalam pengambilan setiap Keputusan strategis dan operasional terkait pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaporan Hasil Penilaian Risiko dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Bupati nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada pasal 22 ayat (1) "Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan risiko". Ayat (2) Laporan Pengelolaan Risiko pada ayat (1) meliputi a. Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko; b. Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR; dan c. Laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan. Dan hasil pelaksanaan penilaian Risiko tahun 2024 ini, disampaikan kepada Bupati Kutai Kartanegara, dan Kami berharap dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan strategis dan operasional dalam mengoptimalkan pencapaian tujuan pemerintah daerah.

1.2 Tujuan Pelaporan Pengelolaan Risiko:

Tujuan pelaporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagai berikut:

1. Memberikan informasi hasil identifikasi Risiko, analisis Risiko dan hasil penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Risiko, pada tujuan dan sasaran strategis, dan operasional pada Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024.
2. Memberikan informasi tingkat Risiko dan Prioritas Penanganan Risiko Tahun 2024
3. Memberikan informasi tentang rencana pemantauan pelaksanaan RTP Risiko Tahun 2024.
4. Memberikan bahan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penanganan risiko strategis dan operasional lebih lanjut atas kejadian risiko sisa (*residual Risk*) yang memerlukan penanganan langsung oleh pimpinan pemerintah daerah.

1.3 Dasar Pelaksanaan

Dasar Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 7);
5. Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2023 Tentang SOTK Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tanggal 11 Oktober Tahun 2023 Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.
6. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko yaitu dilaksanakan pada Risiko strategis sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis dan Risiko operasional sesuai dengan program dan kegiatan/sub kegiatan dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara

BAB II PENETAPAN KONTEKS MANAJEMEN RISIKO

2..1 Konteks Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Konteks Manajemen Risiko mengacu pada Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu:

a. Visi dan Misi Inspektorat

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 dirumuskan Visi sebagai berikut:

“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera dan Berbahagia”

Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 Sebagai Berikut:

- 1) Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani
- 2) Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya
- 3) Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
- 4) Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah
- 5) Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan

b. Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan, Indikator Tujuan dan target tujuan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Tabel berikut:

Tabel
Indikator Tujuan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tahun 2024
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	PAD Sektor Pariwisata	1.527.206.119

Sasaran strategis, indikator dan target tahun 2024 sesuai Tabel berikut:

Tabel
Sasaran strategis Indikator Kinerja Utama dan Target

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024
1	Meningkatnya Kunjungan Wisatawa	Jumlah Kunjungan Wisatawan Persentase Okupansi	2.044.146
2	Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Kreatif	Jumlah Aktifitas Ekonomi Kreati	5

c. Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan Program, kegiatan/sub kegiatan dengan indikator hasil (*output*) sesuai Tabel berikut:

Tabel
Program, Kegiatan Indikator, Target dan Jumlah Anggaran

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator	Target	Jumlah Anggaran	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	7 Dokumen 20 Laporan 36 Unit 8 Paket	23.753.929.884	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat		Jumlah Dokumen	4 Dokumen 6 Laporan	850.000.000	
I	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen Renja, Renja Perubahan, RKA, DPA)	4 Dokumen	500.000.000
	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan	2 Laporan	150.000.000

			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
1	3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pertriwulan	4 Laporan	200.000.000
2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Yang dibayarkan	12 Bulan	17.855.503.748
2	1		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	136 Orang/bulan	12 Bulan	17.505.503.748
2	2		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2 Laporan	350.000.000
3			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	600.000.000
					90 Orang	
3	1		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	150.000.000
3	2		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis	90 Orang	450.000.000
4			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	2 Laporan	100.000.000
4	1		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Dinas Pariwisata	Jumlah yang dibayarkan	2 Laporan	100.000.000
5			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1.350.000.000
					12 Laporan	
					8 Paket	
5	1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	3 Paket	200.000.000
5	2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik	3 Paket	150.000.000
5	3		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	2 Paket	1500.000.000

5	4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah yang dibayarkan	12 Laporan	700.000.000
5	5	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen	1 Dokumen	150.000.000
6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah yang Terbayar	12 Bulan	2.336.426.136
6	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah yang dibayarkan	12 Bulan	700.000.000
6	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah yang dibayarkan	12 Bulan	1.637.426.136
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah yang Terbayar	36 Unit	662.000.000
7	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah yang dibayarkan	12 Unit	342.000.000
7	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah yang dibayarkan	12 Unit	175.000.000
7	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah yang dibayarkan	12 Unit	145.000.000
II		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI WISATA	TERLAKSANANYA PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA	1 DOKUMEN 12 Laporan 6 Unit 6 Lokasi	49.640.000.000
1		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/kota	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	1 Dokumen 1 Unit	2.975.000.000
1	1	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten/kota	Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata	1 Dokumen	600.000.000
1	2	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam	jumlah sarana dan prasarana pengelolaan	1 Unit	2.375.000.000

		Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/kota	destinasi pariwisata kabupaten/kota yang tersedia dan terpelihara.		
2		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota	Terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata	5 Unit 10 Laporan 6 Lokasi	45.665.000.000
2	1	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota yang tersedia dan terpelihara.	5 Unit	5.230.000.000
2	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.	10 Laporan	1.780.000.000
2	3	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata	6 Lokasi	38.655.000.000
3		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Usaha Pariwisata yang direkomendasikan untuk mendapatkan TDUP	2 Dokumen 2 Laporan	1.000.000.000
3	1	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di Kabupaten/kota	Laporan hasil pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata	2 Laporan	800.000.000
3	2	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Dokumen layanan fasilitasi pendaftaran	2 Dokumen	200.000.000
III		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PRESENTASE OKUPANSI	17 Dokumen 11 Laporan	38.710.000.000
1		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam	5 Dokumen Laporan	38.710.000.000

		Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata		
1	1	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Penyediaan data dan Penyebaran Informasi	5 Dokumen	900.000.000
1	2	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kerjasama dan Kemitraan yang dilaksanakan	3 Dokumen	1.300.000.000
1	3	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Pemasaran	11 Laporan	19.080.000.000
1	4	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Wisatawan	9 Dokumen	17.430.000.000
IV		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	PELAKU EKONOMI KREATIF YANG TERFASILITASI	1 DOKUMEN 2 Laporan 3 Unit	2.900.000.000
1		Penyediaan Prasaranan (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pertumbuhan Pelaku Ekraf	3 Unit	750.000.000
1	1	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Tersedianya prasarana sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif	3 Unit	750.000.000
2		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen pengembangan ; jumlah pelaku	2 Laporan 1 Dokumen	2.150.000.000

			usaha ekraf, Jumlah sarana prasarana ekraf yang mendapat fasilitasi pengembangan ekosistem		
2	1	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Dokumen hasil kegiatan	2 Laporan	2.050.000.000
2	2	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Dokumen hasil kegiatan	1 Dokumen	100.000.000
V		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	JUMLAH PERTUMBUHAN PELAKU EKRAF	21 Laporan 190 Orang	27.875.000.000
1		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	21 Laporan 160 Orang	27.675.000.000
1	1	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Event	21 Laporan	25.675.000.000
1	2	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Jumlah peserta /komunitas	120 Orang	1.600.000.000
1	3	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	20 Orang	200.000.000
1	4	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah peserta	20 Orang	200.000.000
2		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku	30 Orang	200.000.000
2	1	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan. Ekonomi Kreatif	Jumlah peserta komunitas	30 Orang	200.000.000

d. Struktur Pengelola Risiko (Unit Pemilik Risiko)

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan pengelolaan Risiko pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara), dan Surat Tugas/SK Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara P.04/DISPAR SET/700.1.2/01 Tanggal 2 Januari Tahun 2024 Susunan Struktur Pengelola Unit Pemilik Risiko/Tim Manajemen Risiko sebagai berikut :

Tabel
Susunan Pelaksana Unit Pemilik Risiko/Tim Manajemen Risiko

No.	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Tim
1	<u>Sugiarto, SH.,M.Si</u> NIP. 19720112 200604 1 014	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara	Ketua Unit UPR Eselon II
2	<u>H. Juanda, SE</u> NIP. 19680814 200312 1 005	Kepala Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Anggota UPR Sekretariat / Ketua UPR Eselon IV Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
3	<u>Awang Suriansyah, SE</u> NIP. 19680929 199301 1 001	Analisis SDM Aparatur	Anggota UPR Eselon Bidang Sekretariat
4	<u>Edi Muhammad Yusuf Ariadi, SE</u> NIP. 19791123 200112 1 001	Perencana	Anggota UPR Esselon Bidang Sekretariat
5	<u>Muhammad Ridha Fatrianta, SSTP.,M.Si</u> NIP. 19840609 200212 1 002	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata	Anggota Unit Eselon II / Ketua UPR Eselon III Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata
6	<u>Airin Susanti, SE.,MM</u> NIP. 19730311 200012 2 003	Adyatama Kepariwisataa & Ekraf	Anggota Unit Eselon III Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata
7	<u>Drs.Triyatma</u> NIP. 19660612 199303 1 015	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	Anggota UPR Eselon II / Ketua UPR Eselon III Bidang Pemasaran Pariwisata
8	<u>Awang Ivan Akhmad Yamani, S.Sos</u> NIP. 19861208 201101 1 001	Adyatama Kepariwisataa & Ekraf	Anggota UPR Eselon III Bidang Pemasaran Pariwisata
9	<u>David Haka Saputra, S.Pi</u> NIP. 19761101 200112 1 005	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Anggota UPR Eselon II / Ketua UPR Eselon III Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
10	<u>Sy. Alfi Chairin Fathillah, SE</u> NIP. 19740318 199803 2 003	Adyatama Kepariwisataa & Ekraf	Anggota UPR Eselon III Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
11	<u>Drs. Surya Gunawan</u> NIP. 19700214 200604 1 006	Adyatama Kepariwisataa & Ekraf	Anggota UPR Eselon III Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
12	<u>Evy Wahyuni, S.Sos.,M.Si</u> NIP. 19771112 199803 2 005	Adyatama Kepariwisataa & Ekraf	Anggota UPR Eselon III Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

13	<u>Antoni Kusbiantoro, S.STP</u> NIP. 19800620 200012 1 001	Kepala Bidang Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota UPR Eselon II / Ketua UPR Eselon III Bidang Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
14	<u>Hj. Yayuk Sri Rahayu, S.Sos</u> NIP. 19720616 200012 2 002	Adyatama Kepariwisata & Ekraf	Anggota UPR Eselon III bidang Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
15	<u>Hadiyansyah, S.STP.,M.Si</u> NIP. 19841028 200312 1 001	Adyatama Kepariwisata & Ekraf	Anggota UPR Eselon III Bidang Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
16	<u>Gondo Suli Setyowati,SE.,M.Si</u>	Adyatama Kepariwisata & Ekraf	Anggota UPR Eselon III Bidang Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
17	<u>Agus Budiman</u> NIP. 19760816 200012 1 002	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota UPR Gol. III.b / Admin Program
18	<u>Eka Rahmawani, S.Sos</u> NIP. 19810722 2009002 2 003	Pengolah Data	Anggota UPR Gol.III.b / Admin Kepagawaian
19	<u>Verawati Pajrin</u> NIP. 19830205 200902 2 004	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Anggota UPR II.c / Admin Umum

Tugas Unit Pemilik Risiko (UPR)/Tim Satgas Manajemen Risiko Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

- 1) melaksanakan kegiatan penilaian Risiko (*risk assessment*) atas Risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
- 2) melaporkan peristiwa Risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
- 3) Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa Risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian Risiko di masa yang akan datang.
- 4) Menyusun hasil penilaian Risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
- 5) Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian Risiko.
- 6) Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian Risiko.

2.2. Pengendalian Intern Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pengelolaan Risiko Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara telah disusun Kriteria Efektivitas Pengendalian Intern pada Standar Operasional Prosedur untuk mendukung pelaksanaan tata kelola pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan kriteria sebagai berikut:

a. Kriteria Efektifitas Sistem Pengendalian Internal

Tabel
Kriteria Efektifitas Sistem Pengendalian Internal

Deskripsi	Kriteria		Keefektifan
	Desain	Operasional	
Kontrol bersifat preventif, dapat dioperasikan dan dilaksanakan secara konsisten. Perlu dipantau karena terpengaruh perubahan kondisi.	Ya	Ya	Efektif
Kontrol mencakup sebagian dari kebutuhan. Jika desain bagus operasional sebagian	Ya Tidak	Tidak Ya	Sebagian efektif
Baik desain maupun operasional dari kontrol yang ada tidak memadai. Perlu didesain ulang untuk perbaikan atau ganti baru.	Tidak	Tidak	Tidak efektif.

b. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri 3 komponen, yaitu skala kemungkinan terjadinya (probabilitas) risiko, skala dampak risiko, dan skala tingkat risiko (nilai risiko).

b. Skala Kemungkinan (Probabilitas) Risiko

Tabel
Skala Kemungkinan (Probabilitas) Risiko

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Hampir pasti terjadi/Sangat sering	5	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 70%, atau lebih dari 7 kali dalam 5 Tahun)
Kemungkinan besar	4	Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 51 – 70% atau 5 sampai dengan 7 kali dalam 5 Tahun)
Kemungkinan sedang	3	Kemungkinan terjadinya Risiko sedang (sebesar 31 – 50% atau 3 sampai dengan 5 kali dalam 5 Tahun)

Kemungkinan kecil/Jarang	2	Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar 11% - 30% atau 1 sampai dengan 3 kali dalam 5 Tahun)
Sangat Jarang	1	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0 – 10% atau 1 kali dalam 5 Tahun)

d. Skala Dampak Risiko

Tabel
Skala Dampak Risiko

Level Dampak	Area Dampak				
	Kerugian Negara	Penurunan Reputasi	Penurunan Kinerja	Gangguan Terhadap	Tuntutan Hukum
Tidak Signifikan (1)	Jumlah kerugian negara ≤ Rp1 Juta	Keluhan <i>Stakeholder</i> secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya ≤ 3 dalam satu periode	Pencapaian target kinerja ≥ 100%	Pelayanan tertunda ≤ 1 hari	Jumlah tuntutan hukum ≤ 5 kali dalam satu Periode
Minor (2)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp1 Juta s.d Rp5 Juta	Keluhan <i>Stakeholder</i> secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya lebih dari 3 dalam satu periode	Pencapaian target kinerja di atas 80% s.d 100%	Pelayanan tertunda di atas 1 hari s.d 5 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 5 kali s.d 15 kali dalam satu periode
Moderat (3)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp5 Juta s.d Rp10 Juta	Pemberitaan negatif di media massa lokal	Pencapaian target kinerja di atas 50% s.d 80%	Pelayanan tertunda di atas 5 hari s.d 15 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 15 kali s.d 30 kali
Signifikan (4)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp10 Juta s.d	Pemberitaan negatif di media massa nasional	Pencapaian target kinerja di atas 25% s.d 50%	Pelayanan tertunda di atas 15 hari s.d 30 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 30 kali
Sangat Signifikan (5)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp. 50	Pemberitaan negatif di media massa internasional	Pencapaian target kinerja ≤ 25%	Pelayanan tertunda lebih dari 30 hari	Jumlah tuntutan hukum

e. Skala Penerimaan Nilai Risiko

Tabel
Skala Nilai Penerimaan Risiko

Kategori Dampak	Kriteria untuk Penerimaan Risiko (<i>Risk Appetite</i>)
1-2 (Sangat Rendah)	Dapat diterima
3-4 (Rendah)	Dapat diterima
6-9 (Tinggi)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
12-16 (Sangat Tinggi)	Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik
20-25 (Dahsyat)	Tidak dapat diterima atau ditolak, diperlukan pengendalian yang sangat kuat dan sangat baik
Kategori Dampak	Kriteria untuk Penerimaan Risiko (<i>Risk Tolerance</i>)
1-5 (Sangat Rendah)	Dapat diterima
6-10 (Rendah)	Dapat diterima
11-15 (Tinggi)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
16-20 (Sangat Tinggi)	Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik
21-25 (Dahsyat)	Tidak dapat diterima atau ditolak, diperlukan pengendalian yang sangat kuat dan sangat baik

F. Kriteria Tingkat Risiko

Gambar
Matriks Tingkat Risiko

Matriks Risiko						
Kemungkinan	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
	Dampak					

Pengelompokan Prioritas Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara
Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel
Pengelompokan prioritas Tingkat Risiko

Nilai Skala	Warna	Tingkat	Prioritas
1 -5	Hijau	Rendah	5
6 – 8	Hijau Muda	Rendah sedang	4
9 – 12	Kuning	Sedang tinggi	3
15 – 20	Jingga	Tinggi	2
20. - 25	Merah	Sangat Tinggi	1

g. Kriteria Tingkat Risiko Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara
Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel
Pemetaan Tingkat Risiko, selera Risiko, Toleransi Risiko dan Eskalasi Tindakan

Tingkat Risiko	Selera Risiko	Toleransi Risiko	Tindakan Eskalasi
Sangat Tinggi	Risiko tidak dapat diterima dan perlu dilakukan pengendalian terutama tindakan responsif.	Risiko tidak dapat diterima dan ditoleransi	Perlu perhatian Dewan Pengawas organisasi dan Pengendalian dapat dieskalasi kepemimpinan organisasi dan didukung dengan rencana penanganan terinci.
Tinggi	Risiko tidak dapat diterima dan perlu dilakukan pengendalian baik preventif maupun respontif.	dan perlakuan risiko perlu dikaji ulang untuk perbaikan atau penambahan. perlakuan atau ganti yang baru.	Perlu perhatian pimpinan oganisasi, pengendalian eskalasi kepemimpinan manajemen senior organisasi dan didukung rencana rinci
Sedang tinggi	Risiko tidak dapat diterima dan perlu dilakukan pengendalian terutama tindakan preventif.		Pengendalian dieskalasi ke manajer senior selaku pemilik risiko dan didukung dengan rencana rinci.
Sedang rendah	Risiko tidak dapat diterima, namun perlakuan pengendalian hanya dilakukan jika manfaat yang diterima lebih besar dari biayanya	Risiko tidak dapat diterima tapi dapat ditoleransi sepanjang secara praktek menguntungkan.	Pengendalian cukup dengan Manajer Bidang sesuai dengan kebijakan dan SOP yang berlaku.
Rendah	Risiko dapat diterima sehingga tidak perlu	Risiko dapat diterima dan ditoleransi	Pertahankan pengendalian yang

		perlakuan, cukup kontrol yang ada, tapi perlu dimonitor oleh pemilik risiko.	sehingga tidak perlu perlakuan, cukup dengan kontrol yang ada dan dimonitor oleh pemilik risiko.	ada dan monitor tingkat keterjadian risiko untuk perlakuan risiko.
--	--	--	--	--

BAB III
HASIL PENILAIAN RISIKO

3.1 Unit Pemilik Risiko Esselon II

3.1.1 Plt.Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Pejabat : Sugiarto, SH.,M.Si

NIP : 19720112 200604 1 014

a. Sasaran strategis yang dikelola Esselon II

Sasaran Strategis Esselon II sesuai Tabel berikut:

Tabel
Sasaran Strategis, Indikator, Target dan anggaran UPR Esselon II

No. (1)	Tujuan/Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Anggaran Rp. (5)
1	Tujuan: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Presentase DTW yang memenuhi Aksesibilitas Amenitas dan Atraksi	1.527.206.119	142.878.929.884
1.1	Sasaran : Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Presentase DTW yang memenuhi Aksesibilitas Amenitas dan Atraksi	2.044.146	
1.2	Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Kreatif	Pelaku Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi	5	

b. Identifikasi Risiko Strategis

Hasil Identifikasi Risiko Strategis sesuai Tabel berikut :

Tabel
Hasil identifikasi Risiko Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Resiko	UC/C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik risiko/ penanggung jawab/ Pihak yg terkena Dampak
	Meningkatnya kontribusi Meningkatkan Kunjungan Wisatawan dan Meningkatkan Aktifitas Ekonomi Kreatif	infrastruktur dan aksesibilitas destinasi wisata kurang memadai	Kewenangan untuk membangun sarana infrastruktur berada di Perangkat daerah lainnya	Eksternal	UC/C	Jumlah Kunjungan rendah	Kepala Dinas
		Pelaksanaan even belum sesuai standar target occupansi wisatawan	Penetapan Jadwal dan biaya penyelenggaraan belum sesuai dengan target Okupansi.	Internal	C	Target lamanya okupansi tidak terpenuhi	Kepala Dinas
		SDM pengelola Pariwisata belum melakukan pengelolaan secara profesional.	Terbatasnya anggaran kegiatan pelatihan peningkatan SDM Pariwisata.	Internal	C	Kepuasan Wisatawan terhadap destinasi wisata rendah	Kepala Dinas
		1. Perijinan instansi terkait terhambat	Dokumen kelengkapan perijinan belum dilengkapi oleh Panitia Pelaksana.	Internal	C	Pelaksanaan even kegiatan tertunda	Kepala Dinas

		2. Sarana dan prasara penyelenggaraan even belum tersedia tepat waktu	Penyedia belum menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai jadwal yang ditentukan.	Eksternal	UC	Pelaksanaan even kegiatan tertunda	Kepala Dinas
--	--	---	--	-----------	----	------------------------------------	--------------

c. Analisis Risiko Strategis

Hasil Analisis Risiko Strategis sesuai Tabel berikut:

Tabel
Hasil Analisis Risiko

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko			Kategori / peringkat risiko	Pencegahan yg sudah ada (Kepatuhan /Aturan /SOP dll)	Existing Pengendalian		Perlakuan Risiko	Rencana Pengendalian Tambahan	Analisis Risiko Setelah Pengendalian			Risiko Sisa / Residual Risk	
		K	D	S			Memadai/ Tidak memadai	Efektif/ Tidak Efektif			K	D	S		Level Risiko
RS 1	infrastruktur dan aksesibilitas destinasi wisata kurang memadai	5	5	25	Sangat Tinggi	belum ada	tidak memadai	tidak efektif	Mitigasi	Berkoordinasi dengan Instansi terkait tentang pembangunan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata	3	4	12	Sedang Tinggi	ada
RS 2	Pelaksanaan even belum sesuai standar target occupansi wisatawan	4	5	20	Tinggi	belum ada	tidak memadai	tidak efektif	Mitigasi	berkoordinasi dengan penyelenggara even untuk melaksanakan kegiatan sesuai lamanya target occupansi.	3	4	12	Sedang Tinggi	ada

RS 3	SDM pengelola Pariwisata belum melakukan pengelolaan secara profesional.	4	5	20	Tinggi	belum ada	tidak memadai	tidak efektif	Mitigasi	Meningkatkan jumlah kegiatan pelatihan dan sertifikasi pengelolaan Pariwisata	3	3	9	Sedang Tinggi	ada
RS 4	1. Perijinan instansi terkait terhambat	3	5	15	Tinggi	belum ada	tidak memadai	tidak efektif	Mitigasi	Panitia melengkapai persyaratan perijinan pelaksanaan even kegiatan wisata	2	2	4	Rendah	ada
RS 5	2. Sarana dan prasarana penyelenggaraan even belum tersedia tepat waktu	3	5	15	Sedang Tinggi	belum ada	tidak memadai	tidak efektif	Mitigasi	melakukan pemilihan penyedia yang memiliki kompetensi	2	2	4	Rendah	ada

Pemetaan Penanganan Risiko Program dan Kegiatan

Gambar

Matriks Pemetaan Penanganan Risiko Program dan Kegiatan

Matriks Peta Risiko						
Kemungkinan	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
Dampak						

Keterangan: A = (Kode Risiko) sebelum penanganan
 A1 = (Kode Risiko) setelah penanganan Risiko

d. Hasil Evaluasi Risiko Program dan Kegiatan Eselon III sebagai berikut:

Tabel

Hasil Evaluasi Risiko Program dan Kegiatan

Program :

Kode Risiko	Risiko Yang Teridentifikasi	Nilai Skor	Kategori Level Risiko	Peringkat
1	2	3	4	5
RP 1	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena terjadi bencana alam dan disebabkan oleh penetapan jadwal Kegiatan tidak memprediksi kejadian bencana	15	Tinggi	5
RP 2	Peserta pelatihan tidak mencukupi Kuota karena peserta berhalangan hadir pada saat pelatihan disebabkan oleh Peserta mendapat halangan atau jadwal kegiatan yang lain	15	Tinggi	5
RP 3	Anggaran yang disediakan tidak mencukupi kebutuhan disebabkan oleh defisit anggaran yang diterima Pemda dari Dana Bagi Hasil	15	Tinggi	5

RP 4	Dukungan data dari pelaksana kegiatan terlambat dan atau tidak menyampaikan capaian kinerja masing-masing pelaksana kegiatan disebabkan oleh Dokumentasi dan pengarsipan laporan pelaksanaan kegiatan belum dilakukan dengan baik	25	Sangat Tinggi	5
RP 5	1. Kegiatan Even malam hari tidak ada. disebabkan oleh Atraksi budaya yang diselenggarakan malam hari belum diterima masyarakat luas	25	Sangat Tinggi	5
RP 6	2. Koordinasi kegiatan lintas bidang masih kurang disebabkan oleh Detail informasi kegiatan yang dipromosikan disampaikan secara mendadak.	20	Tinggi	4
RP 7	3. Fasilitas wisata yang masih terbatas disebabkan oleh Dukungan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wisata terbatas	25	Sangat Tinggi	5
RP 8	4. Aksesibilitas menuju obyek wisata kurang memadai disebabkan oleh Lokasi tujuan obyek wisata berada di daerah terpencil sarana aksesnya belum dibangun secara memadai.	25	Sedang Tinggi	5
RP 9	5. Sarana pariwisata belum dikelola secara optimal disebabkan oleh Keterbatasan SDM Pengelola di Instansi Pemerintah dan Pengelola swasta	25	Sangat Tinggi	5
RP 10	Pelaku usaha belum memahami dokumen dan persyaratan lainnya yang diperlukan disebabkan oleh Kurangnya informasi dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata kepada pelaku ekonomi kreatif	0		
RP 11	1. anggaran kegiatan tidak mencukupi kebutuhan disebabkan oleh Kebijakan dari perbendaharaan yang menyesuaikan dengan anggaran kas dan SPD yang dialokasikan	15	Tinggi	5
RP 12	2. Lokasi Susah dimonitoring disebabkan oleh Kurangnya akses komunikasi	20	Tinggi	4
RP 13	3. Perhatian pelaku usaha untuk memanmbah daya tarik wisata masih kurang disebabkan oleh Modal pelaku usaha bisnis wisata terbatas	16	Tinggi	4

Kegiatan:

Kode Risiko	Risiko Yang Teridentifikasi	Skor	Kategori/ peringkat risiko	Peringkat
RK 1	Target tidak tercapai	15	Tinggi	5
RK 2	Target tidak tercapai	12	Sedang Tinggi	3
RK 3	Dokumen tidak didukung dengan data lengkap	2	Rendah	2
RK 4	-	-	-	-
RK 5	ASN tidak menerima gaji dan tunjangan disebabkan oleh laporan keuangan dan laporan BMD belum sinkronisasi	2	Rendah	2
RK 6	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah tidak terlaksana disebabkan oleh dokumen belum lengkap	2	Rendah	2
RK 7	-	-	-	-

RK 8	Terdapat adanya perbedaan data barang milik daerah dengan fisik barang disebabkan oleh Pejabat Pengurus Barang kurang teliti dan cermat dalam memeriksa barang hasil pengadaan yang dilaksanakan oleh PPKom ketika barang diserahkan terimakan dari PPKom kepada Kepala Dinas yang diwakili oleh Pengurus Barang sehingga terdapat perbedaan data BMD pada Pengurus Barang dengan data realisasi belanja modal dan belanja operasi berbeda.	20	Tinggi	4
RK 9	-	-	-	-
RK 10	Pegawai Tidak membuat laporan kinerja atas pekerjaan yang dilaksanakan.	12	Sedang Tinggi	2
RK 11	Penyelenggaraan BinteK Peraturan Perundangan tidak tersedia	20	Tinggi	4
RK 12	-	-	-	-
RK 13	Rekanan yang ditunjuk tidak mampu memenuhi peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kontrak disebabkan oleh Rekanan tidak memiliki kompetensi dalam penyediaan peralatan sarana dan prasarana	20	Tinggi	4
RK 14	Rekanan yang ditunjuk tidak mampu memenuhi Jenis Bahan Logistik yang sesuai dengan kontrak. disebabkan oleh Rekanan tidak memiliki kompetensi dalam memenuhi Jenis Bahan Logistik yang sesuai dengan kontrak.	20	Tinggi	4
RK 15	Rekanan yang ditunjuk tidak mampu memenuhi Jenis Bahan Cetak dan penggandaan yang sesuai dengan kontrak. disebabkan oleh Rekanan tidak memiliki kompetensi dalam memenuhi Jenis Bahan Cetak yang sesuai dengan kontrak.	20	Tinggi	4

RK 16	Petugas yang ditunjuk tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya disebabkan oleh Petugas yang membidangi sedang dalam penugasan lain oleh Kepala Dinas	20	Tinggi	4
RK 17	Penataan arsip dinamis belum menggunakan kodefikasi arsip disebabkan oleh Petugas penatausahaan arsip belum mengikuti diklat dan sosialisasi penggunaan kodefikasi arsip	4	Rendah	2
RK 18	-	-	-	-
RK 19	Kurang sinkronnya tarif tagihan pembayaran, listrik, air, telepon dengan pencairan dana yang tersedia	4	Rendah	2
RK 20	Petugas kurang teliti dalam perhitungan gaji Non ASN disebabkan oleh Adanya kesalahan penginputan nilai nominal gaji non ASN	20	Tinggi	4
RK 21	-	-	-	-
RK 22	Jadwal Pemeliharaan persetiap Unit Kendaraan Operasional, Jabatan. belum tersusun. disebabkan oleh Petugas pelaksana lalai dalam menyusun jadwal	20	Tinggi	4
RK 23	Jadwal pemeliharaan per setiap unit kendaraan operasional atau lapangan belum tersusun disebabkan oleh Petugas pelaksana lalai dalam menyusun jadwal	20	Tinggi	4

RK 24	Data Kerusakan Peralatan dan Mesin Lainnya menurut satuan unit dan biaya yang diperlukan belum disusun secara terperinci sesuai dengan klasifikasi kerusakannya disebabkan oleh Petugas pelaksana yang melaksanakan inventarisasi dan pendataan kerusakan peralatan dan mesin lainnya tidak cermat memeriksa kerusakan per unit dan belum melakukan konfirmasi besarnya biaya yang diperlukan kepada toko/ tempat pelayanan perbaikan	20	Tinggi	4
RK 25	-	-	-	-
RK 26	-	-	-	-
RK 29	Kegiatan tidak terlaksana dan/atau dilaksanakan tidak optimal	15	Tinggi	5
RK 31	Kegiatan terlambat dilaksanakan	15	Tinggi	5
RK 32	Kegiatan tidak dilaksanakan secara optimal	15	Tinggi	5

RK 33	kegiatan pengadaan pemeliharaan dan rehabilitasi tidak dilaksanakan secara optimal	15	Tinggi	5
RK 31	Kegiatan terlambat dilaksanakan	15	Tinggi	5
RK 32	Kegiatan tidak dilaksanakan secara optimal	15	Tinggi	5
RK 33	kegiatan pengadaan pemeliharaan dan rehabilitasi tidak dilaksanakan secara optimal	15	Tinggi	5
RK 34	Target kegiatan tidak akan tercapai	1	Rendah	1
RK 35	tidak terlaksananya kegiatan pengadaan perlengkapan homestay Pokdarwis Dewi Karya, Wisata Air Pokdarwis Bekayuh beumbai Bebudaya dan Tenda Glamping Pokdarwis Karya Ambalat tidak optimal	15	Tinggi	5

RK 36	-	-	-	-
RK 37	Pelaku usaha belum memahami dokumen persyaratan pendaftaran perijinan obyek usaha	12	Sedang Tinggi	4
RK 38	SPD yang dialokasikan tidak tersedia dengan kebutuhan kegiatan	12	Sedang Tinggi	4
RK 39	-	-	-	-
RK 40	-	-	-	-
RK 41	Kegiatan penguatan promosi target tidak tercapai	20	Tinggi	4
RK 42	Kegiatan penguatan promosi target tidak tercapai	15	sedang	5
RK 43	Perbup Perjadin membatasi pelaku usaha dalam pembiayaan	25	Tinggi	5
RK 44	Direktori data Kepariwisataaan tidak lengkap dan tepat waktu	20	Tinggi	4

RK 45	Target tidak tercapai	20	Tinggi	4
RK 46	1.Perpanjangan server domain dan bendwindhth, 2. Gangguan hacker, 3. Aplikasi	20	Tinggi	4
RK 47	Kebutuhan informasi pariwisata melalui website dan medsos lebih dominan dari media cetak	20	Tinggi	4
RK 48	keterlambatan pembayaran pada pihak ketiga	25	Sangat Tinggi	5
RK 49	Pelaksanaan tidak berjalan sesuai dengan rencana	15	Tinggi	4
RK 50	-	-	-	-
RK 51	-	-	-	-
RK 52	Prasarana Kota Kreatif belum dapat dikembangkan dan direvitalisasi secara maksimal disebabkan oleh Lahan yang akan dikembangkan dan direvitalisasi belum terpenuhi persyaratan legalitas lahan dan bangunannya	9	Sedang Tinggi	3

RK 53	-	-	-	-
RK 54	Kegiatan pengembangan eksosistem tidak terlaksana sesuai jadwal disebabkan oleh masih terdampak covid dan keterlambatan SPD	6	Rendah Sedang	3
RK 55	Kurang terpenuhinya data untuk penyusunan dokumen disebabkan oleh Data survey pada 9 kecamatan belum memenuhi kriteria penilaian	2	Rendah	2
RK 57	-	-	-	-
RK 58	Terbatas anggaran kegiatan	15	Tinggi	15
RK 59	Peserta atau SDM tidak dapat menghadiri sebagai peserta	2	Rendah	2
RK 61	Terbatasnya anggaran kegiatan	15	Tinggi	5
RK 62	Peserta tidak menghadiri sebagai peserta	12	Sedang Tinggi	4
RK 63	Kegiatan fasilitasi proses kreasi dilaksanakan tidak sesuai perencanaan disebabkan oleh peserta dari mancanegara tidak bisa hadir karena biaya yang cukup tinggi	6	Rendah Sedang	3
RK 64	Kegiatan Pengukuhan komite ekraf tidak terlaksana disebabkan oleh SPD belum tersedia	6	Rendah Sedang	3
RK 66	-	-	-	-
RK 67	Kegiatan pengembangan kapasitas tidak dapat terlaksana tepat waktu disebabkan oleh SPD belum tersedia	6	Rendah Sedang	3

e. Perlakuan dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko

Perlakukan (respon) dan rencana tindak pengendalian risiko strategis eselon II sesuai Tabel berikut:

Tabel
Rencana Tindak Pengendalian Risiko Strategis

Kode Resiko	Risiko yang teridentifikasi	Perlakuan	Rencana Tindak Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana Pengendalian
RS 1	infrastruktur dan aksesibilitas destinasi wisata kurang memadai	mitigasi	Berkoordinasi dengan Instansi terkait tentang pembangunan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata	Februari 2024	Bidang Destinasi Pariwisata
RS 2	Pelaksanaan even belum sesuai standar target occupansi wisatawan	mitigasi	berkoordinasi dengan penyelenggara even untuk melaksanakan kegiatan sesuai lamanya target occupansi.	Januari-Desember 2024	Bidang Ekraf
RS 3	SDM pengelola Pariwisata belum melakukan pengelolaan secara profesional.	mitigasi	Meningkatkan jumlah kegiatan pelatihan dan sertifikasi pengelolaan Pariwisata	Januari-Desember 2024	Bidang Ekraf
RS 4	1. Perijinan instansi terkait terhambat	mitigasi	Panitia melengkapi persyaratan perijinan pelaksanaan even kegiatan wisata	Januari-Desember 2024	Bidang Ekraf

RS 5	2. Sarana dan prasara penyelenggaraan even belum tersedia tepat waktu.	mitigasi	melakukan pemilihan penyedia yang memiliki kompetensi.	Januari-Desember 2024	Sekretaris
------	--	----------	--	-----------------------	------------

f. Pemantauan Risiko

Pemantauan Pelaksanaan Rencana Tidak Pengendalian Risiko Strategis sesuai Tabel berikut:

Tabel
Pemantauan RTP Risiko Strategis Esselon II

Rencana Tindak pengendalian Tambahan	Waktu Pelaksanaan (Bulan)												Pelaksana Pengendalian (Pihak yg melaksanakan RTP)	Pemilik Risiko/Penanggung jawab Risiko	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Melakukan Penjadwalan Ulang kegiatan yang dilaksanakan pada bulan yang aman bencana						√								PPTK Kegiatan	KEPALA DINAS
Kepala Dinas mengintruksikan kepada Kabid ekraf untuk mempersiapkan peserta cadangan			√											PPTK Kegiatan	KEPALA DINAS

Melakukan pergeseran anggaran.							√	√	√							PPTK Kegiatan	KEPALA DINAS	
Surat Edaran Kadis Kepada seluruh pelaksana kegiatan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tepat waktu paling lambat minggu pertama dibulan Januari																√	Sekretaris	KEPALA DINAS
Berkoodinasi dengan Bidang Ekraf, Perangkat Daerah lainnya yang dukung sektor Wisata, Pemerinta Desa, dan Masyarakat Bisnis Wisata dan Komunitas Wisata.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		Kabid Pemasaran Pariwisata	KEPALA DINAS
Melaksanakan Rapat Internal Dinas Pariwisata membahas detailk informasi yang akan dipromosikan	√																Kabid Pemasaran Pariwisata	KEPALA DINAS
Melakukan Koordinasi dan evaluasi fasilitas wisata kepada pengelola Destinasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		Kabid Pemasaran Pariwisata	KEPALA DINAS

Berkoodinasi dengan Dinas lainnya yang menangani pembangunan sarana akses menuju destinasi wisata.			√															Kabid Pemasaran Pariwisata	KEPALA DINAS
Melakukan pelatihan pengelolaan destinasi wisata			√															Kabid Pemasaran Pariwisata	KEPALA DINAS
Berkoordinasi dengan dinas lainnya									√									Kabid Ekraf Pariwisata	KEPALA DINAS
Melakukan pendekatan kepada pihak ketiga untuk bersedia mendahulukan sambil menunggu anggaran kas									√									Kabid Pengembangan Destinasi	KEPALA DINAS
Melakukan komunikasi melalui Hand Phone	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kabid Pengembangan Destinasi	KEPALA DINAS
melakukan pendekatan persuasif dengan pelaku usaha untuk membenahi fasilitas yang dimilikinya.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kabid Pengembangan Destinasi	KEPALA DINAS

Keterangan : (Warna Hijau rencana pelaksanaan)
(Warna Kuning Realisasi pelaksanaan)

g. Pelaksanaan dan Hambatan dalam Pengendalian Risiko

Pelaksanaan dan Hambatan dalam Pengendalian Risiko strategis eselon II

sesuai Tabel berikut:

3.2. Unit Pengelola Risiko (UPR) Eselon II

3.2.1 Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Pejabat : Sugiarto, SH.M.Si

NIP : 19720112 200604 1 014

a. Program dan kegiatan yang dikelola sesuai Tabel berikut:

Tabel
 Sasaran Strategis, Indikator, Target dan Anggaran

No.	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	7 Dokumen 20 Laporan 36 Unit 8 Paket	23.753.929.884
1.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Paket, Laporan, Dokumen	3.150.000.000
1.2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah yang Terbayar	Unit	662.000.000
1.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah yang Terbayar	Laporan	2.336.426.136
1.4	Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen, orang	600.000.000
1.5	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen	Dokumen, Laporan	850.000.000
1.6	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Unit	100.000.000
1.7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Yang dibayarkan	Bulan	17.855.503.748

b. Hasil Identifikasi Risiko Program dan Kegiatan sesuai Tabel berikut:

Tabel
Hasil Identifikasi Risiko Program dan Kegiatan

No.	Nama Kegiatan /Sub Kegiatan	Kode risiko	Pernyataan/Uraian Risiko	Sebab Risiko	Sumber Risiko	Uc/C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik risiko/ penanggung jawab/ Pihak yg terkena Dampak
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		RS 1	Dokumen tidak didukung dengan Data lengkap	Data belum lengkap	internal	C	Dokumen Tidak bisa disusun	Kepala Dinas/ PPTK/ASN
		RS 2	Dokumen tidak didukung dengan Data lengkap	Data belum lengkap	internal	C	Dokumen Tidak bisa disusun	Kepala Dinas/ PPTK/ASN
		RS 3	Dokumen tidak didukung dengan data lengkap	Data belum lengkap	internal	C	dokumen tidak bisa disusun	Kepala Dinas/PPTK/ASN
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RS 4						

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RS 5	ASN tidak menerima gaji dan tunjangan	laporan keuangan dan laporan BMD belum sinkronisasi	internal	C	Tertambatnya pembayaran TPP	Kepala Dinas/PPTK/A SN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Dinas Pariwisata	RS 6	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah tidak terlaksana	dokumen belum lengkap	internal	C	Pelaksana Kegiatan tidak terbayar honorarium	Kepala Dinas/PPTK/P eserta dan ASN/Pelaksana Kegiatan
	Administrasi Barang Milik Daerah	RS 7						
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Dinas Pariwisata	RS 8	Terdapat adanya perbedaan data barang milik daerah dengan fisik barang	Pejabat Pengurus Barang kurang teliti dan cermat dalam memeriksa barang hasil pengadaan yang dilaksanakan oleh PPKomr ketika barang diserahkan terimakan dari PPKomr kepada Kepala Dinas yang diwakili oleh Pengurus Barang sehingga terdapat perbedaan data BMD pada Pengurus Barang dengan data realisasi belanja modal dan belanja operasi berbeda.	internal	C	-	Kepala Dinas/ PPTK/ASN

	Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah	RS 9	Pegawai Tidak membuat laporan kinerja atas pekerjaan yang dilaksanakan.	Kemampuan SDM dalam membuat laporan terbatas	internal	C	laporan Monev kinerja tidak dapat disusun	Kepala Dinas/ PPTK/ASN
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	RS 10			internal	C		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	RS 11	Penyelenggaraan Birtek Peraturan Perundangan tidak tersedia	Kasubag Kepegawaian Kurang berkoordinasi dengan pihak penyelenggara Dsiklat	eksternal	UC	Diklat Tidak dapat dilaksanakan	Kepala Dinas Parwisata
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	RS 12						
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	RS 13	Rekanan yang ditunjuk tidak mampu memenuhi peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kontrak	Rekanan tidak memiliki kompetensi dalam penyediaan peralatan sarana dan prasarana	internal	C	-	Kepala Dinas/ PPTK/ASN
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	RS 14	Rekanan yang ditunjuk tidak mampu memenuhi Jenis Bahan Logistik yang sesuai dengan kontrak.	Rekanan tidak memiliki kompetensi dalam memenuhi Jenis Bahan Logistik yang sesuai dengan kontrak.	internal	C	-	Kepala Dinas/ PPTK/ASN
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	RS 15	Rekanan yang ditunjuk tidak mampu memenuhi Jenis Bahan Cetak dan pengandaan yang sesuai dengan kontrak.	Rekanan tidak memiliki kompetensi dalam memenuhi Jenis Bahan Cetak yang sesuai dengan kontrak.	internal	C	-	Kepala Dinas/ PPTK/ASN

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RS 16	Petugas yang ditunjuk tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	Petugas yang membidangi sedang dalam penugasan lain oleh Kepala Dinas	internal	C	-	Kepala Dinas/ PPTK/ASN
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	RS 17	Penataan arsip dinamis belum menggunakan kodeifikasi arsip	Petugas penatausahaan arsip belum mengikuti diklat dan sosialisasi penggunaan kodeifikasi arsip	Internal	C	Kurang tertatanya arsip dinas secara maksimal	Kepala Dinas/ PPTK/ASN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RS 18						
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RS 19	Kurang sinkronnya tarif tagihan pembayaran, listrik, air, telepon dengan pencairan dana yang tersedia	Kenaikan Tarif dasar air, listrik, telepon	Eksternal	UC	Terjadi kurang bayar yang mengakibatkan STS	Kepala Dinas/ PPTK/ASN
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RS 20	Petugas kurang teliti dalam perhitungan gaji Non ASN	Adanya kesalahan penginputan nilai nominal gaji non ASN	internal	C	-	Kepala Dinas/ PPTK/ASN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	RS 21						

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	RS 22	Jadwal Pemeliharaan per setiap Unit Kendaraan Operasional, Jabatan belum tersusun	Petugas pelaksana lalai dalam menyusun jadwal	internal	C	-	Kepala Dinas/ PPTK/ASN
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	RS 23	Jadwal pemeliharaan per setiap unit kendaraan operasional atau lapangan belum tersusun	Petugas pelaksana lalai dalam menyusun jadwal	internal	C	-	Kepala Dinas/ PPTK/ASN
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RS 24	Data Kerusakan Peralatan dan Mesin Lainnya menurut satuan unit dan biaya yang diperlukan belum disusun secara terperinci sesuai dengan klasifikasi kerusakannya	Petugas pelaksana yang melaksanakan inventarisasi dan pendataan kerusakan peralatan dan mesin lainnya tidak cermat memeriksa kerusakan per unit dan belum melakukan konfirmasi besarnya biaya yang diperlukan kepada toko/ tempat pelayanan perbaikan	internal	C	-	Kepala Dinas/ PPTK/ASN

RK 10	Pegawai Tidak membuat laporan kinerja atas pekerjaan yang dilaksanakan.	3	4	12	Sedang Tinggi	tidak ada	Tidak memadai	Tidak Efektif	Mitigasi
RK 11	Penyelenggaraan Bintek Peraturan Perundangan tidak tersedia	4	5	20	Tinggi	tidak ada	Tidak memadai	Tidak Efektif	Mitigasi
RK 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RK 13	Rekaman yang ditunjuk tidak mampu memenuhi peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kontrak disebabkan oleh Rekaman tidak memiliki kompetensi dalam penyediaan peralatan sarana dan prasarana	4	5	20	Tinggi	\$OP	Memadai	Efektif	Mitigasi
RK 14	Rekaman yang ditunjuk tidak mampu memenuhi Jenis Bahan Logistik yang sesuai dengan kontrak disebabkan oleh Rekaman tidak memiliki kompetensi dalam memenuhi Jenis Bahan Logistik yang sesuai dengan kontrak.	4	5	20	Tinggi	\$OP	Memadai	Efektif	Mitigasi
RK 15	Rekaman yang ditunjuk tidak mampu memenuhi Jenis Bahan Cetakan dan pengandaan yang sesuai dengan kontrak disebabkan oleh Rekaman tidak memiliki kompetensi dalam memenuhi Jenis Bahan Cetakan yang sesuai dengan kontrak.	4	5	20	Tinggi	\$OP	Memadai	Efektif	Mitigasi

RK 22	Jadwal Pemeliharaan persetiap Unit Kendaraan Operasional, Jabatan belum tersusun disebabkan oleh Petugas pelaksana lalai dalam menyusun jadwal	4	5	20	Tinggi	\$OP	Memadai	Efektif	Mitigasi
RK 23	Jadwal pemeliharaan per setiap unit kendaraan operasional atau lapangan belum tersusun disebabkan oleh Petugas pelaksana lalai dalam menyusun jadwal	4	5	20	Tinggi	\$OP	Memadai	Efektif	Mitigasi

<p>RK 24</p>	<p>Data Kerusakan Peralatan dan Mesin Lainnya menurut satuan unit dan biaya yang diperlukan belum disusun secara terperinci sesuai dengan klasifikasi kerusakannya disebabkan oleh Petugas pelaksanaan yang melaksanakan inventarisasi dan pendataan kerusakan peralatan dan mesin lainnya tidak cermat memeriksa kerusakan per unit dan belum melakukan konfirmasi besarnya biaya yang diperlukan kepada toko/ tempat pelayanan perbaikan</p>	4	5	20	Tinggi	\$OP	Memadai	Efektif	Mitigasi
--------------	--	---	---	----	--------	------	---------	---------	----------

d. Pemetaan Penanganan Risiko Program dan Kegiatan

Gambar

Matriks Pemetaan Penanganan Risiko Program dan Kegiatan

Matriks Peta Risiko						
Kemungkinan	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15 A
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2 A1	3	4	5
		1	2	3	4	5
Dampak						

Keterangan: A = (Kode Risiko) sebelum penanganan
 A1 = (Kode Risiko) setelah penanganan Risiko

e. Hasil Evaluasi Risiko Program dan Kegiatan Eselon III sebagai berikut:

Tabel

Hasil Evaluasi Risiko Program dan Kegiatan

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Skor	Kategori Level risiko	Peringkat
RK 1	Target tidak tercapai	15	Tinggi	5
RK 2	Target tidak tercapai	12	Sedang Tinggi	4

RK 3	Dokumen tidak didukung dengan data lengkap	2	Rendah	2
RK 4	-	-	-	-
RK 5	ASN tidak menerima gaji dan tunjangan disebabkan oleh laporan keuangan dan laporan BMD belum sinkronisasi	2	Rendah	2
RK 6	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah tidak terlaksana disebabkan oleh dokumen belum lengkap	2	Rendah	2
RK 7	-	-	-	-
RK 8	Terdapat adanya perbedaan data barang milik daerah dengan fisik barang disebabkan oleh Pejabat Pengurus Barang kurang teliti dan cermat dalam memeriksa barang hasil pengadaan yang dilaksanakan oleh PPKom ketika barang diserahkan terimakan dari PPKom kepada Kepala Dinas yang diwakili oleh Pengurus Barang sehingga terdapat perbedaan data BMD pada Pengurus Barang dengan data realisasi belanja modal dan belanja operasi berbeda.	20	Tinggi	5
RK 9	-	-	-	-
RK 10	Pegawai Tidak membuat laporan kinerja atas pekerjaan yang dilaksanakan.	12	Sedang Tinggi	4
RK 11	Penyelenggaraan Bintek Peraturan Perundangan tidak tersedia	20	Tinggi	5
RK 12	-	-	-	-
RK 13	Rekanan yang ditunjuk tidak mampu memenuhi peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kontrak disebabkan oleh Rekanan tidak memiliki kompetensi dalam penyediaan peralatan sarana dan prasarana	20	Tinggi	5

RK 14	Rekanan yang ditunjuk tidak mampu memenuhi Jenis Bahan Logistik yang sesuai dengan kontrak.disebabkan olehRekanan tidak memiliki kompetensi dalam memenuhi Jenis Bahan Logistik yang sesuai dengan kontrak.	20	Tinggi	5
RK 15	Rekanan yang ditunjuk tidak mampu memenuhi Jenis Bahan Cetak dan penggandaan yang sesuai dengan kontrak.disebabkan olehRekanan tidak memiliki kompetensi dalam memenuhi Jenis Bahan Cetak yang sesuai dengan kontrak.	20	Tinggi	5
RK 16	Petugas yang ditunjuk tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya disebabkan olehPetugas yang membidangi sedang dalam penugasan lain oleh Kepala Dinas	20	Tinggi	5
RK 17	Penataan arsip dinamis belum menggunakan kodefikasi arsipdisebabkan olehPetugas penatausahaan arsip belum mengikuti diklat dan sosialisasi penggunaan kodefikasi arsip	4	Rendah	2
RK 18	-	-	-	-
RK 19	Kurang sinkronnya tarif tagihan pembayaran, listrik, air, telepon dengan pencairan dana yang tersedia	4	Rendah	2
RK 20	Petugas kurang teliti dalam perhitungan gaji Non ASNdisebabkan olehAdanya kesalahan penginputan nilai nominal gaji non ASN	20	Tinggi	5
RK 21	-	-	-	-
RK 22	Jadwal Pemeliharaan persetiap Unit Kendaraan Operasional; Jabatan belum tersusun disebabkan olehPetugas pelaksana lalai dalam menyusun jadwal	20	Tinggi	5

RK 23	Jadwal pemeliharaan per setiap unit kendaraan operasional atau lapangan belum tersusun disebabkan oleh Petugas pelaksana lalai dalam menyusun jadwal	20	Tinggi	5
RK 24	Data Kerusakan Peralatan dan Mesin Lainnya menurut satuan unit dan biaya yang diperlukan belum disusun secara terperinci sesuai dengan klasifikasi kerusakannya disebabkan oleh Petugas pelaksana yang melaksanakan inventarisasi dan pendataan kerusakan peralatan dan mesin lainnya tidak cermat memeriksa kerusakan per unit dan belum melakukan konfirmasi besarnya biaya yang diperlukan kepada toko/ tempat pelayanan perbaikan	20	Tinggi	5

f. Perlakuan (*Respon*) dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko

Respon dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko pada Program dan Kegiatan eselon III sesuai dengan Tabel berikut:

Tabel
Rencana Tindak Pengendalian Risiko Program dan Kegiatan/sub Kegiatan

Kode Resiko	Risiko yang teridentifikasi	Perlakuan	Rencana Tindak pengendalian	Target Waktu (Rencana Jadwal RTP)	Pelaksana Pengendalian (Pihak yg melaksanakan RTP)
RK 1	Target tidak tercapai	Mitigasi	Melakukan pergeseran anggaran pada anggaran yang tidak menjadi prioritas	Jun-24	Kasubag Program Dinas Pariwisata

RK 2	Target tidak tercapai	Mitigasi	Melakukan pergeseran anggaran pada anggaran yang tidak menjadi prioritas	Jun-24	Kasubag Program Dinas Pariwisata
RK 3	Dokumen tidak didukung dengan data lengkap	Mitigasi	Reviu SOP Kegiatan	12 bulan	PPTK
RK 4					
RK 5	ASN tidak menerima gaji dan tunjangan disebabkan oleh laporan keuangan dan laporan BMD belum sinkronisasi	Mitigasi	Surat instruksi kepada penyusun laporan keuangan dan penyusun laporan BMD untuk melaksanakan sinkronisasi	12 bulan	PPTK
RK 6	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah tidak terlaksana disebabkan oleh dokumen belum lengkap	Mitigasi	Surat instruksi kepada PPTK untuk melengkapi dokumen administrasi keuangan	12 bulan	PPTK
RK 7	-	-	-	-	-
RK 8	Terdapat adanya perbedaan data barang milik daerah dengan fisik barang disebabkan oleh Pejabat Pengurus Barang kurang teliti dan cermat dalam memeriksa barang hasil pengadaan yang dilaksanakan oleh PPKom ketika barang diserahkan dari PPKom kepada Kepala Dinas yang diwakili oleh Pengurus Barang sehingga terdapat perbedaan data BMD pada Pengurus Barang dengan data realisasi belanja modal dan belanja operasi berbeda.	Mitigasi	-	Januari - Desember 2024	Kasubag Umum dan Ketatalaksanaan

RK 9	-	-	-	-	-
RK 10	Pegawai Tidak membuat laporan kinerja atas pekerjaan yang dilaksanakan.	Mitigasi	Membuat edaran kepada seluruh pegawai untuk membuat laporan kinerja tepat waktu.	Jan-24	Sekretaris
RK 11	Penyelenggaran Bintek Peraturan Perundangan tidak tersedia	Mitigasi	Koordinasi dengan pihak-pihak lembaga terkait untuk meminta jadwal pelaksanaan pelatihan	Mar-24	Sekretaris
RK 12					
RK 13	Rekanan yang ditunjuk tidak mampu memenuhi peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kontrak disebabkan olehRekanan tidak memiliki kompetensi dalam penyediaan peralatan sarana dan prasarana	Mitigasi	'Telah tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor	Januari - Desember 2024	Kasubbag Umum dan Ketatalaksanaan
RK 14	Rekanan yang ditunjuk tidak mampu memenuhi Jenis Bahan Logistik yang sesuai dengan kontrak.disebabkan olehRekanan tidak memiliki kompetensi dalam memenuhi Jenis Bahan Logistik yang sesuai dengan kontrak.	Mitigasi	'Telah tersedianya data bahan logistik kantor didalam kontrak-	Januari - Desember 2024	Kasubbag Umum dan Ketatalaksanaan
RK 15	Rekanan yang ditunjuk tidak mampu memenuhi Jenis Bahan Cetakan dan penggandaan yang sesuai dengan kontrak.disebabkan olehRekanan tidak memiliki kompetensi dalam memenuhi Jenis Bahan Cetakan yang sesuai dengan kontrak.	Mitigasi	'Telah tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Januari - Desember 2024	Kasubbag Umum dan Ketatalaksanaan

RK 16	Petugas yang ditunjuk tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya disebabkan oleh Petugas yang membidangi sedang dalam penugasan lain oleh Kepala Dinas	Mitigasi	'Intruksi Kepala Dinas kepada Sekretaris, Kasubbag, Kasubbid dan Adyatama Kepariwisata dan Ekraf Subkoordinator Dinas Pariwisata untuk menunjukkan petugas dalam melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Januari - Desember 2024	Kasubbag Umum dan Ketatalaksanaan
RK 17	Penataan arsip dinamis belum menggunakan kodefikasi arsip disebabkan oleh Petugas penatausahaan arsip belum mengikuti diklat dan sosialisasi penggunaan kodefikasi arsip	Mitigasi	Koordinasi dan konsultasi kepada instansi terkait	Januari - Desember 2024	Kasubbag Umum dan Ketatalaksanaan
RK 18	-	-	-	-	-
RK 19	Kurang sinkronnya tarif tagihan pembayaran, listrik, air, telepon dengan pencairan dana yang tersedia	Mitigasi	Verifikasi jumlah tagihan Listrik, air dan telpon	Januari - Desember 2024	Kasubbag Umum dan Ketatalaksanaan
RK 20	Petugas kurang teliti dalam perhitungan gaji Non ASN disebabkan oleh Adanya kesalahan penginputan nilai nominal gaji non ASN	Mitigasi	'Telah tersedianya data bahan logistik kantor didalam kontrak	Januari - Desember 2024	Kasubbag Umum dan Ketatalaksanaan
RK 21	-	-	-	-	-
RK 22	Jadwal Pemeliharaan persetiap Unit Kendaraan Operasional, Jabatan belum tersusun disebabkan oleh Petugas pelaksana lalai	Mitigasi	'Kendaraan dinas terganggu / hambatan	Januari - Desember 2024	Kasubbag Umum dan Ketatalaksanaan

	dalam menyusun jadwal				
RK 23	Jadwal pemeliharaan per setiap unit kendaraan operasional atau lapangan belum tersusun disebabkan oleh Petugas pelaksana lalai dalam menyusun jadwal	Mitigasi	Operasional dinas terganggu / hambatan	Januari - Desember 2024	Kasubbag Umum dan Ketatalaksanaan
RK 24	Data Kerusakan Peralatan dan Mesin Lainnya menurut satuan unit dan biaya yang diperlukan belum disusun secara terperinci sesuai dengan klasifikasi kerusakannya disebabkan oleh Petugas pelaksana yang melaksanakan inventarisasi dan pendataan kerusakan peralatan dan mesin lainnya tidak cermat memeriksa kerusakan per unit dan belum melakukan konfirmasi besarnya biaya yang diperlukan kepada toko/ tempat pelayanan perbaikan	Mitigasi	Peralatan tidak dapat digunakan untuk bekerja	Januari - Desember 2024	Kasubbag Umum dan Ketatalaksanaan

g. Pemantauan Risiko

Pemantauan Pelaksanaan Rencana Tidak Pengendalian Risiko Program dan Kegiatan sesuai Tabel berikut:

Tabel

Pemantauan RTP Risiko Program dan Kegiatan eselon III

Rencana Tindak pengendalian Tambahan	Waktu Pelaksanaan (Bulan)												Pelaksana Pengendalian (Pihak yg melaksanakan RTP)	Pemilik Risiko/Penanggung jawab Risiko	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Melakukan pergeseran anggaran pada anggaran yang tidak menjadi prioritas						√								PPTK Kegiatan	Kepala Dinas Pariwisata
Melakukan pergeseran anggaran pada anggaran yang tidak menjadi prioritas						√								PPTK Kegiatan	Kepala Dinas Pariwisata
Reviu SOP Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK	Kepala Dinas
Surat instruksi kepada penyusun laporan keuangan dan penyusun laporan BMD untuk melaksanakan sinkronisasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK	Kepala Dinas/Subag Penyusunan Program dan Keuangan
Surat instruksi kepada PPTK untuk melengkapi dokumen administrasi keuangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK	Kepala Dinas/Subag Penyusunan Program dan Keuangan

Nota dinas / instruksi kepala dinas kepada pengurus barang untuk melaksanakan pemeriksaan guna memastikan jumlah dan kualitas barang hasil pengadaan sesuai dengan dokumen kontrak yang diserahkan PPKom kepada kepala dinas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK	Kepala Dinas/Subbag Umum
Membuat edaran kepada seluruh pegawai untuk membuat laporan kinerja tepat waktu	√													Analisis SDM Aparatur	Kepala Dinas Pariwisata
Koordinasi dengan pihak-pihak lembaga terkait untuk meminta jadwal pelaksanaan pelatihan			√											Analisis SDM Aparatur	Kepala Dinas Pariwisata
Instruksi kepala dinas kepada PPKom untuk melaksanakan pemilihan calon penyedia barang dan jasa untuk penyediaan barang peralatan kantor sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK	Kepala Dinas/Subbag Umum
Instruksi kepala dinas kepada kasubbag umum dan ketatalaksanaan untuk menyiapkan stock logistik kebersihan kantor	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK	Kepala Dinas/Subbag Umum
Instruksi kepala dinas kepada kasubbag umum dan ketatalaksanaan mengenai pemeliharaan kantor	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK	Kepala Dinas/Subbag Umum
Instruksi Kepala Dinas kepada Sekretaris, Kasubbag, Kasubbid dan Adyatama Kepariwisata dan Ekraf Subkoordinator Dinas Pariwisata untuk menunjukkan petugas dalam melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK	Kepala Dinas/Subbag Umum
Instruksi kepala dinas mengenai penatausahaan arsip		√			√				√				√	PPTK Kegiatan	Kepala Dinas Pariwisata

Mengalokasikan / menyediakan anggaran tambahan kegiatan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK Kegiatan	Kepala Dinas Pariwisata
Review kertas kerja kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK Kegiatan	Kepala Dinas Pariwisata
menyampaikan surat permohonan perbaikan kendaraan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK Kegiatan	Kepala Dinas Pariwisata
menyampaikan surat permohonan perbaikan kendaraan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK Kegiatan	Kepala Dinas Pariwisata
Menyampaikan surat permohonan perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK Kegiatan	Kepala Dinas Pariwisata
Koordinasi dengan bagian terkait pelaksanaan kegiatan							√							Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
Koordinasi dengan bagian keuangan tentang alokasi penyediaan SPD.						√								Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kepala Dinas Pariwisata
Kadis mengintruksikan kepada Panitia dan Pejabat Pengadaan agar melaksanakan pemilihan penyedia sesuai ketentuan.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kepala Dinas Pariwisata
Melakukan koordinasi dengan Bappeda dan TAPD untuk pengalokasian anggaran pengadaan/pemeliharaan/rehabitasi sarana pariwisata						√								Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kepala Dinas Pariwisata
Koordinasi dengan bagian keuangan tentang alokasi penyediaan SPD.						√								Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kepala Dinas Pariwisata

Kadis mengintruksikan kepada Panitia dan Pejabat Pengadaan agar melaksanakan pemilihan penyedia sesuai ketentuan.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kepala Dinas Pariwisata
Melakukan koordinasi dengan Bappeda dan TAPD untuk pengalokasian anggaran pengadaan/pemeliharaan/re habitasi sarana pariwisata						√								Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kepala Dinas Pariwisata
Melakukan koordinasi dengan Bappeda dan TAPD untuk pengalokasian anggaran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kepala Dinas Pariwisata
Koordinasi dengan bagian terkait pelaksanaan kegiatan							√							Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
Sosialisasi persyaratan dan Ikelengkapan perijinan TDUP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kepala Dinas Pariwisata
Mengusulkan alokasi SPD sesuai dengan kebutuhan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kepala Dinas Pariwisata
Koordinasi dengan Kepala Dinas tentang alokasi penyelesaian anggaran promosi			√											Kabid Pemasaran	Kepala Dinas Pariwisata
Melakukan relokasi tempat pelaksanaan kegiatan yang tidak rawan bencana				√										Kabid Pemasaran	Kepala Dinas Pariwisata
Melakukan perubahan metode promosi dengan meminta alat peraga yang dipromosikan dari pelaku usaha											√			Kabid Pemasaran	Kepala Dinas Pariwisata

3.3 Unit Pengelola Risiko Eselon IV

3.3.1 Kasubag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Nama Pejabat : H. Juanda, SE

NIP : 19680814 200312 1 005

h. Program dan kegiatan yang dikelola sesuai Tabel berikut:

i.

Tabel
Sasaran Strategis, Indikator, Target dan Anggaran

No.	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
1.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	2 Laporan	100.000.000
1.1.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	100.000.000
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen		3.150.000.000
1.2.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan kantor dan Perlengkapan	3 Paket	200.000.00
1.2.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik	3 Paket	150.000.000
1.2.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	2 Paket	150.000.000
1.2.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah yang dibayarkan	12 Laporan	700.000.000
1.2.5	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150.000.000
1.2.6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah yang dibayarkan	12 Laporan	700.000.000
1.2.7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah yang dibayarkan	12 Laporan	1.636.426.136
1.2.8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah yang dibayarkan	24 Unit	342.000.000
1.2.9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah yang dibayarkan	8 Unit	175.000.000
1.2.10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		12 Unit	145.000.000

j. Hasil Identifikasi Risiko Program dan Kegiatan sesuai Tabel berikut:

Tabel
Hasil Identifikasi Risiko Program dan Kegiatan

No.	Nama Kegiatan /Sub Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan/Uraian Risiko	Sebab Risiko	Sumber Risiko	UC/C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik risiko/ penanggung jawab/ Pihak yg terkena Dampak
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	RS 7		Pejabat Pengurus Barang kurang teliti dan cermat dalam memeriksa barang hasil pengadaan yang dilaksanakan oleh PPKom ketika barang diserahkan terimakasih dari PPKom kepada Kepala Dinas yang diwakili oleh Pengurus Barang sehingga terdapat perbedaan data	Internal	C	1. Penyajian data dan informasi laporan keuangan tidak sesuai dengan fakta mengakibatkan Penilaian Opini BPK terhadap pemerintah Kukar menurun. 2. Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak optimal	Kepala Dinas/ PPTK/ASN
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Dinas Pariwisata	RS 8	Terdapat adanya perbedaan data barang milik daerah dengan fisik barang					

				BMD pada Pengurus Barang dengan data realisasi belanja modal dan belanja operasi berbeda.				
	Administrasi Umum Peringkat Daerah	RS 12	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	RS 13	Rekaman yang ditunjuk tidak mampu memenuhi peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kontrak	Rekaman tidak memiliki kompetensi dalam penyediaan peralatan sarana dan prasarana	internal	C	Terhambatnya Aktivitas Administrasi Perkantoran dan Pencapaian Kinerja Dinas Pariwisata	Kepala Dinas/ PPTK/ASN
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	RS 14	Rekaman yang ditunjuk tidak mampu memenuhi Jenis Bahan Logistik yang sesuai dengan kontrak.	Rekaman tidak memiliki kompetensi dalam memenuhi Jenis Bahan Logistik yang sesuai dengan kontrak.	internal	C	Kenyamanan suasana kerja di kantor menurun akibat kurangnya bahan logistik bahan pembersih	Kepala Dinas/ PPTK/ASN
	Penyediaan Barang Cetak dan Perenggandaan	RS 15	Rekaman yang ditunjuk tidak mampu memenuhi Jenis Bahan Cetak dan perenggandaan yang sesuai dengan kontrak.	Rekaman tidak memiliki kompetensi dalam memenuhi Jenis Bahan Cetak yang sesuai dengan kontrak.	internal	C	Aktivitas administrasi kantor dan capaian kinerja menjadi terhambat	Kepala Dinas/ PPTK/ASN

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RS 16	Petugas yang ditunjuk tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	Petugas yang membidangi sedang dalam penugasan lain oleh Kepala Dinas	internal	C	Petugas yang ditunjuk tidak dapat mengambil Keputusan Pimpinan dan atau keputusan yang diambil tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian kinerja Dinas Pariwisata	Kepala Dinas/ PPTK/ASN
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	RS 17	Penataan arsip dinamis belum menggunakan kodefikasi arsip	Petugas penatausahaan arsip belum mengikuti diklat dan sosialisasi penggunaan kodefikasi arsip	Internal	C	Naskah dinas tidak tertata dan terarsip dengan baik	Kepala Dinas/ PPTK/ASN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RS 18	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RS 19	Kurang sinkronnya tarif tagihan pembayaran, listrik, air, telepon dengan pencairan dana yang tersedia	Kenaikan Tarif dasar air, listrik, telepon	Eksternal	UC	Adanya pemutusan jaringan internet dari pihak ketiga dan kinerja petugas pelaksana pada sub bagian umum ketatalaksanaan	Kepala Dinas/ PPTK/ASN

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RS 20	Petugas kurang tehti dalam perhitungan gaji Non ASN	Adanya kesalahan penghitungan nilai nominal gaji non ASN	internal	C	Keterlambatan pembayaran gaji Non ASN, kesalahan perhitungan Non ASN	Kepala Dinas/ PPTK/ASN
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	RS 21	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	RS 22	Jadwal Pemeliharaan per setiap Unit Kendaraan Operasional, Jabatan belum tersusun	Petugas pelaksana lalai dalam menyusun jadwal	internal	C	Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan Dinas Parwisata kurang terawat dan cepat rusak	Kepala Dinas/ PPTK/ASN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	RS 23	Jadwal pemeliharaan per setiap unit kendaraan operasional atau lapangan belum tersusun	Petugas pelaksana lalai dalam menyusun jadwal	internal	C	Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan Dinas Parwisata kurang terawat dan cepat rusak	Kepala Dinas/ PPTK/ASN
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RS 24	Data Kerusakan Peralatan dan Mesin Lainnya menurut satuan unit dan biaya yang diperlukan belum disusun secara terperinci sesuai	Petugas pelaksana yang melaksanakan inventarisasi dan pendataan kerusakan peralatan dan mesin lainnya tidak cermat	internal	C	Peralatan dan mesin yang dimiliki Dinas Parwisata tidak dapat mendukung pelaksanaan aktivitas pekerjaan dan	Kepala Dinas/ PPTK/ASN

			dengan klasifikasi kerusakannya	memeriksa kerusakan per unit dan belum melakukan konfirmasi besarnya biaya yang diperlukan kepada toko/ tempat pelayanan perbaikan		capaian kinerja Dinas Pariwisata tidak optimal	
--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--

k. Hasil Analisis Risiko Program dan Kegiatan sesuai Tabel berikut

Hasil Analisis Risiko Program dan Kegiatan
Tabel

Hasil Analisis Risiko

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko			Kategori / peringkat risiko	Pengendalian yg sudah ada (Kepatuhan SOP)	Existing Pengendalian		Perlakuan Risiko	Status Risiko setelah ada Penanganan (Risk After Mitigation)			Residu (Ada/Tidak)	
		K	D	S			Memadai/ Tidak memadai	Efektif/ Tidak Efektif		K	D	S		Level Risiko
RK 1	Target tidak tercapai	3	5	15	Tinggi	Tidak ada	Tidak memadai	Tidak Efektif	Mitigasi	2	4	8	Rendah Sedang	ada
RK 2	Target tidak tercapai	3	4	12	Sedang Tinggi	Tidak ada	Tidak memadai	Tidak Efektif	Mitigasi	2	4	8	Rendah Sedang	ada
RK 3	Dokumen tidak didukung dengan data lengkap	1	2	2	Rendah	SOP	Tidak	Tidak Efektif	Mitigasi	2	2	4	Rendah	Ada
RK 4	ASN tidak menerima gaji dan tunjangan disebakan oleh laporan keuangan dan laporan BMD belum sinkronisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RK 5	ASN tidak menerima gaji dan tunjangan disebakan oleh laporan keuangan dan laporan BMD belum sinkronisasi	1	2	2	Rendah	SOP	Memadai	Tidak Efektif	Mitigasi	1	1	1	Rendah	Ada

RK 6	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah tidak terlaksana disebabkan oleh dokumen belum lengkap	1	2	2	Rendah	SOP	Memadai	Tidak Efektif	Mitigasi	1	1	1	Rendah	Ada
RK 7	Terdapat adanya perbedaan data barang milik daerah dengan fisik barangdisebabkan olehPejabat Pengurus Barang kurang teliti dan cermat dalam memeriksa barang hasil pengadaan yang dilaksanakan oleh PPKom ketika barang diserah terimakan dari PPKom kepada Kepala Dinas yang diwakili oleh Pengurus Barang sehingga tedapat pebedaan data BMD pada Pengurus Barang dengan data realisasi belanja modal dan belanja operasi berbeda.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RK 8		4	5	20	Tinggi	SOP	Memadai	Efektif	Mitigasi	4	3	12	Sedang Tinggi	Tidak ada
RK 9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RK 10	Pegawai Tidak membuat laporan kinerja atas pekerjaan yang dilaksanakan.	3	4	12	Sedang Tinggi	tidak ada	Tidak memadai	Tidak Efektif	Mitigasi	2	4	8	Rendah Sedang	ada

RK 11	Penyelenggaraan Bintek Peraturan Perundang-undangan tidak tersedia	4	5	20	Tinggi	tidak ada	Tidak memadai	Tidak Efektif	Mitigasi	2	4	8	Rendah Sedang	ada
RK 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RK 13	Rekaman yang ditunjukkan tidak mampu memenuhi peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kontrak disebabkan oleh Rekaman tidak memiliki kompetensi dalam penyediaan peralatan sarana dan prasarana	4	5	20	Tinggi	SOP	Memadai	Efektif	Mitigasi	4	3	12	Sedang Tinggi	Tidak ada
RK 14	Rekaman yang ditunjukkan tidak mampu memenuhi Jenis Bahan Logistik yang sesuai dengan kontrak; disebabkan oleh Rekaman tidak memiliki kompetensi dalam memenuhi Jenis Bahan Logistik yang sesuai dengan kontrak.	4	5	20	Tinggi	SOP	Memadai	Efektif	Mitigasi	4	3	12	Sedang Tinggi	Tidak ada
RK 15	Rekaman yang ditunjukkan tidak mampu memenuhi Jenis Bahan Cetak dan pengandaan yang sesuai dengan kontrak; disebabkan oleh Rekaman tidak memiliki kompetensi dalam memenuhi Jenis Bahan Cetak yang sesuai dengan kontrak.	4	5	20	Tinggi	SOP	Memadai	Efektif	Mitigasi	4	3	12	Sedang Tinggi	Tidak ada

RK 16	Petugas yang ditunjuk tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya disebabkan oleh Petugas yang membidangi sedang dalam penugasan lain oleh Kepala Dinas	4	5	20	Tinggi	SOP	Memadai	Efektif	Mitigasi	4	3	12	Sedang Tinggi	Tidak ada
RK 17	Penataan arsip dinamis belum menggunakan kodefikasi arsip disebabkan oleh Petugas penatausahaan arsip belum mengikuti diklat dan sosialisasi penggunaan kodefikasi arsip	2	2	4	Rendah	Melaksanakan Bimtek Kearsipan	Memadai	Efektif	Mitigasi	1	1	1	Rendah	Tidak ada
RK 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RK 19	Kurang sinkronnya tarif tagihan pembayaran, listrik, air, telepon dengan pencairan dana yang tersedia	2	2	4	Rendah	Koordinasi dengan pihak terkait (Kantor Pos, PLN, PDAM, Telkom)	Memadai	Efektif	Mitigasi	2	2	4	Rendah	Tidak

RK 20	Petugas kurang teliti dalam perhitungan gaji Non ASN disebabkan oleh adanya kesalahan penginputan nilai nominal gaji non ASN	4	5	20	Tinggi	SOP	Memadai	Efektif	Mitigasi	4	3	12	Sedang Tinggi	Tidak ada
RK 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RK 22	Jadwal Pemeliharaan per setiap Unit Kendaraan Operasional, Jabatan belum tersusun disebabkan oleh Petugas pelaksana lalai dalam menyusun jadwal	4	5	20	Tinggi	SOP	Memadai	Efektif	Mitigasi	4	3	12	Sedang Tinggi	Tidak ada
RK 23	Jadwal pemeliharaan per setiap unit kendaraan operasional atau lapangan belum tersusun disebabkan oleh Petugas pelaksana lalai dalam menyusun jadwal	4	5	20	Tinggi	SOP	Memadai	Efektif	Mitigasi	4	3	12	Sedang Tinggi	Tidak ada

<p>RK 24</p>	<p>Data Kerusakan Peralatan dan Mesin Lainnya menurut satuan unit dan biaya yang diperlukan belum disusun secara terperinci sesuai dengan klasifikasi kerusakannya disebabkan oleh Petugas pelaksana yang melaksanakan inventarisasi dan pendataan kerusakan peralatan dan mesin lainnya tidak cermat memeriksa kerusakan per unit dan belum melakukan konfirmasi besarnya biaya yang diperlukan kepada toko/ tempat pelayanan perbaikan</p>	4	5	20	Tinggi	SOP	Memadai	Efektif	Mitigasi	4	3	12	Sedang Tinggi	Tidak ada
--------------	--	---	---	----	--------	-----	---------	---------	----------	---	---	----	---------------	-----------

I. Pemetaan Penanganan Risiko Program dan Kegiatan

Gambar

Matriks Pemetaan Penanganan Risiko Program dan Kegiatan

Matriks Peta Risiko						
Kemungkinan	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15 A
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2 A1	3	4	5
		1	2	3	4	5
	Dampak					

Keterangan: A = (Kode Risiko) sebelum penanganan
 A1 = (Kode Risiko) setelah penanganan Risiko

m. Hasil Evaluasi Risiko Program dan Kegiatan Eselon III sebagai berikut:

Tabel

Hasil Evaluasi Risiko Program dan Kegiatan

Kode Resiko	Risiko yang teridentifikasi	Skor	Kategori/ peringkat risiko	Peringkat
RK 1	Target tidak tercapai	15	Tinggi	5
RK 2	Target tidak tercapai	12	Sedang Tinggi	4
RK 3	Dokumen tidak didukung dengan data lengkap	2	Rendah	2
RK 4	-	-	-	-
RK 5	ASN tidak menerima gaji dan tunjangan disebabkan oleh laporan keuangan dan laporan BMD belum sinkronisasi	2	Rendah	2
RK 6	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah tidak terlaksana disebabkan oleh dokumen belum lengkap	2	Rendah	2
RK 7	-	-	-	-

RK 8	Terdapat adanya perbedaan data barang milik daerah dengan fisik barang disebabkan oleh Pejabat Pengurus Barang kurang teliti dan cermat dalam memeriksa barang hasil pengadaan yang dilaksanakan oleh PPKom ketika barang diserahkan terimakan dari PPKom kepada Kepala Dinas yang diwakili oleh Pengurus Barang sehingga terdapat perbedaan data BMD pada Pengurus Barang dengan data realisasi belanja modal dan belanja operasi berbeda.	20	Tinggi	5
RK 9	-	-	-	-
RK 10	Pegawai Tidak membuat laporan kinerja atas pekerjaan yang dilaksanakan.	12	Sedang Tinggi	4
RK 11	Penyelenggaraan BinteK Peraturan Perundangan tidak tersedia	20	Tinggi	5
RK 12	-	-	-	-
RK 13	Rekanan yang ditunjuk tidak mampu memenuhi peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kontrak disebabkan oleh Rekanan tidak memiliki kompetensi dalam penyediaan peralatan sarana dan prasarana	20	Tinggi	5
RK 14	Rekanan yang ditunjuk tidak mampu memenuhi Jenis Bahan Logistik yang sesuai dengan kontrak disebabkan oleh Rekanan tidak memiliki kompetensi dalam memenuhi Jenis Bahan Logistik yang sesuai dengan kontrak.	20	Tinggi	5
RK 15	Rekanan yang ditunjuk tidak mampu memenuhi Jenis Bahan Cetak dan pengadaan yang sesuai dengan kontrak disebabkan oleh Rekanan tidak memiliki kompetensi dalam memenuhi Jenis Bahan Cetak yang sesuai dengan kontrak.	20	Tinggi	5
RK 16	Petugas yang ditunjuk tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya disebabkan oleh Petugas yang membidangi sedang dalam penugasan lain oleh Kepala Dinas	20	Tinggi	5

RK 17	Penataan arsip dinamis belum menggunakan kodefikasi arsip disebabkan oleh Petugas penatausahaan arsip belum mengikuti diklat dan sosialisasi penggunaan kodefikasi arsip	4	Rendah	2
RK 18	-	-	-	-
RK 19	Kurang sinkronnya tarif tagihan pembayaran, listrik, air, telepon dengan pencairan dana yang tersedia	4	Rendah	2
RK 20	Petugas kurang teliti dalam perhitungan gaji Non ASN disebabkan oleh Adanya kesalahan penginputan nilai nominal gaji non ASN	20	Tinggi	5
RK 21	-	-	-	-
RK 22	Jadwal Pemeliharaan persetiap Unit Kendaraan Operasional, Jabatan belum tersusun disebabkan oleh Petugas pelaksana lalai dalam menyusun jadwal	20	Tinggi	5
RK 23	Jadwal pemeliharaan per setiap unit kendaraan operasional atau lapangan belum tersusun disebabkan oleh Petugas pelaksana lalai dalam menyusun jadwal	20	Tinggi	5
RK 24	Data Kerusakan Peralatan dan Mesin Lainnya menurut satuan unit dan biaya yang diperlukan belum disusun secara terperinci sesuai dengan klasifikasi kerusakannya disebabkan oleh Petugas pelaksana yang melaksanakan inventarisasi dan pendataan kerusakan peralatan dan mesin lainnya tidak cermat memeriksa kerusakan per unit dan belum melakukan konfirmasi besarnya biaya yang diperlukan kepada toko/ tempat pelayanan perbaikan	20	Tinggi	5

n. Perlakukan (*Respon*) dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko

Respon dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko pada Program dan Kegiatan eselon III sesuai dengan Tabel berikut:

Tabel
Rencana Tindak Pengendalian Risiko Program dan Kegiatan/sub Kegiatan

Kode Resiko	Risiko yang teridentifikasi	Perlakuan	Rencana Tindak pengendalian Tambahan	Target Waktu (Rencana Jadwal RTP)	Pelaksana Pengendalian (Pihak yg melaksanakan RTP)
RK 1	Target tidak tercapai	Mitigasi	Melakukan pergeseran anggaran pada anggaran yang tidak menjadi prioritas	Jun-24	Kasubag Program Dinas Pariwisata
RK 2	Target tidak tercapai	Mitigasi	Melakukan pergeseran anggaran pada anggaran yang tidak menjadi prioritas	Jun-24	Kasubag Program Dinas Pariwisata
RK 3	Dokumen tidak didukung dengan data lengkap	Mitigasi	Reviu SOP Kegiatan	12 bulan	PPTK
RK 4					
RK 5	ASN tidak menerima gaji dan tunjangan disebabkan oleh laporan keuangan dan laporan BMD belum sinkronisasi	Mitigasi	Surat instruksi kepada penyusun laporan keuangan dan penyusun laporan BMD untuk melaksanakan sinkronisasi	12 bulan	PPTK
RK 6	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah tidak terlaksana disebabkan oleh dokumen belum lengkap	Mitigasi	Surat instruksi kepada PPTK untuk melengkapi dokumen administrasi keuangan	12 bulan	PPTK
RK 7	-	-	-	-	-

RK 8	Terdapat adanya perbedaan data barang milik daerah dengan fisik barang disebabkan oleh Pejabat Pengurus Barang kurang teliti dan cermat dalam memeriksa barang hasil pengadaan yang dilaksanakan oleh PPKom ketika barang diserahkan terimakan dari PPKom kepada Kepala Dinas yang diwakili oleh Pengurus Barang sehingga terdapat perbedaan data BMD pada Pengurus Barang dengan data realisasi belanja modal dan belanja operasi berbeda.	Mitigasi	Nota dinas / instruksi kepala dinas kepada pengurus barang untuk melaksanakan pemeriksaan guna memastikan jumlah dan kualitas barang hasil pengadaan sesuai dengan dokumen kontrak yang diserahkan PPKom kepada kepala dinas.	Januari - Desember 2024	Kasubbag Umum dan Ketatalaksanaan
RK 9	-	-	-	-	-
RK 10	Pegawai Tidak membuat laporan kinerja atas pekerjaan yang dilaksanakan.	Mitigasi	Membuat edaran kepada seluruh pegawai untuk membuat laporan kinerja tepat waktu	Jan-24	Sekretaris
RK 11	Penyelenggaran BinteK Peraturan Perundangan tidak tersedia	Mitigasi	Koordinasi dengan pihak-pihak lembaga terkait untuk meminta jadwal pelaksanaan pelatihan	Mar-24	Sekretaris
RK 12	-	-	-	-	-
RK 13	Rekanan yang ditunjuk tidak mampu memenuhi peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kontrak disebabkan oleh Rekanan tidak memiliki kompetensi dalam penyediaan peralatan sarana dan prasarana	Mitigasi	Telah tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor	Januari - Desember 2024	Kasubbag Umum dan Ketatalaksanaan

RK 14	Rekanan yang ditunjuk tidak mampu memenuhi Jenis Bahan Logistik yang sesuai dengan kontrak. disebabkan oleh Rekanan tidak memiliki kompetensi dalam memenuhi Jenis Bahan Logistik yang sesuai dengan kontrak.	Mitigasi	Telah tersedianya data bahan logistik kantor didalam kontrak	Januari - Desember 2024	Kasubbag Umum dan Ketatalaksanaan
RK 15	Rekanan yang ditunjuk tidak mampu memenuhi Jenis Bahan Cetakan dan penggandaan yang sesuai dengan kontrak. disebabkan oleh Rekanan tidak memiliki kompetensi dalam memenuhi Jenis Bahan Cetakan yang sesuai dengan kontrak.	Mitigasi	Telah tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Januari - Desember 2024	Kasubbag Umum dan Ketatalaksanaan
RK 16	Petugas yang ditunjuk tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya disebabkan oleh Petugas yang membidangi sedang dalam penugasan lain oleh Kepala Dinas	Mitigasi	Intruksi Kepala Dinas kepada Sekretaris, Kasubbag, Kasubbid dan Adyatama Kepariwisata dan Ekraf Subkoordinator Dinas Pariwisata untuk menunjukkan petugas dalam melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Januari - Desember 2024	Kasubbag Umum dan Ketatalaksanaan
RK 17	Penataan arsip dinamis belum menggunakan kodefikasi arsip disebabkan oleh Petugas penatausahaan arsip belum mengikuti diklat dan sosialisasi penggunaan kodefikasi arsip	Mitigasi	Koordinasi dan konsultasi kepada instansi terkait	Januari - Desember 2024	Kasubbag Umum dan Ketatalaksanaan
RK 18.	-	-	-	-	-
RK 19	Kurang sinkronnya tarif tagihan pembayaran, listrik, air, telepon dengan pencairan dana yang tersedia	Mitigasi	Mengalokasikan/menyediakan anggaran tambahan kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Januari - Desember 2024	Kasubbag Umum dan Ketatalaksanaan

RK 20	Petugas kurang teliti dalam perhitungan gaji Non ASN disebabkan oleh Adanya kesalahan penginputan nilai nominal gaji non ASN	Mitigasi	Telah tersedianya data bahan logistik kantor didalam kontrak	Januari - Desember 2024	Kasubbag Umum dan Ketatalaksanaan
RK 21	-	-	-	-	-
RK 22	Jadwal Pemeliharaan persetiap Unit Kendaraan Operasional, Jabatan belum tersusun disebabkan oleh Petugas pelaksana lalai dalam menyusun jadwal	Mitigasi	Kendaraan dinas terganggu / hambatan	Januari - Desember 2024	Kasubbag Umum dan Ketatalaksanaan
RK 23	Jadwal pemeliharaan per setiap unit kendaraan operasional atau lapangan belum tersusun disebabkan oleh Petugas pelaksana lalai dalam menyusun jadwal	Mitigasi	Operasional dinas terganggu / hambatan	Januari - Desember 2024	Kasubbag Umum dan Ketatalaksanaan
RK 24	Data Kerusakan Peralatan dan Mesin Lainnya menurut satuan unit dan biaya yang diperlukan belum disusun secara terperinci sesuai dengan klasifikasi kerusakannya disebabkan oleh Petugas pelaksana yang melaksanakan inventarisasi dan pendataan kerusakan peralatan dan mesin lainnya tidak cermat memeriksa kerusakan per unit dan belum melakukan konfirmasi besarnya biaya yang diperlukan kepada toko/ tempat pelayanan perbaikan	Mitigasi	Peralatan tidak dapat digunakan untuk bekerja	Januari - Desember 2024	Kasubbag Umum dan Ketatalaksanaan

o. Pemantauan Risiko

Pemantauan Pelaksanaan Rencana Tidak Pengendalian Risiko Program dan Kegiatan sesuai Tabel berikut:

Tabel
Pemantauan RTP Risiko Program dan Kegiatan Esselon II

Rencana Tindak pengendalian Tambahan	Waktu Pelaksanaan (Bulan)												Pelaksana Pengendalian (Pihak yg melaksanakan RTP)	Pemilik Risiko/Penanggung jawab Risiko	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Melakukan pergeseran anggaran pada anggaran yang tidak menjadi prioritas						√								PPTK Kegiatan	Kepala Dinas Pariwisata
Melakukan pergeseran anggaran pada anggaran yang tidak menjadi prioritas						√								PPTK Kegiatan	Kepala Dinas Pariwisata
Reviu SOP Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK	Kepala Dinas
Surat instruksi kepada penyusun laporan keuangan dan penyusun laporan BMD untuk melaksanakan sinkronisasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK	Kepala Dinas/Subag Penyusunan Program dan Keuangan
Surat instruksi kepada PPTK untuk melengkapi dokumen administrasi keuangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK	Kepala Dinas/Subag Penyusunan Program dan Keuangan

<p>Nota dinas / instruksi kepala dinas kepada pengurus barang untuk melaksanakan pemeriksaan guna memastikan jumlah dan kualitas barang hasil pengadaan sesuai dengan dokumen kontrak yang diserahkan PPKom kepada kepala dinas</p>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
<p>Membuat edaran kepada seluruh pegawai untuk membuat laporan kinerja tepat waktu</p>	√														<p>Analisis SDM Aparatur</p>	<p>Kepala Dinas Pariwisata</p>
<p>Koordinasi dengan pihak-pihak lembaga terkait untuk meminta jadwal pelaksanaan pelatihan</p>			√												<p>Analisis SDM Aparatur</p>	<p>Kepala Dinas Pariwisata</p>
<p>Instruksi kepala dinas kepada PPKom untuk melaksanakan pemilihan calon penyedia barang dan jasa untuk penyediaan barang peralatan kantor sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	<p>PPTK</p>	<p>Kepala Dinas Pariwisata</p>
<p>Instruksi kepala dinas kepada kasubag umum dan ketatalaksanaan untuk menyiapkan stock logistik kebersihan kantor</p>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	<p>PPTK</p>	<p>Kepala Dinas Pariwisata</p>

Instruksi kepala dinas kepada kasubbag umum dan ketatalaksanaan mengenai pemeliharaan kantor	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK	Kepala Dinas Pariwisata
Instruksi Kepala Dinas kepada Sekretaris, Kasubbag, Kasubbid dan Adyatama Kepariwisataan dan Ekraf Subkoordinator Dinas Pariwisata untuk menunjukkan petugas dalam melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK	Kepala Dinas Pariwisata
Instruksi kepala dinas mengenai penatausahaan arsip		√			√			√					√	PPTK Kegiatan	Kepala Dinas Pariwisata
Mengalokasikan / menyediakan anggaran tambahan kegiatan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK Kegiatan	Kepala Dinas Pariwisata
Review kertas kerja kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK Kegiatan	Kepala Dinas Pariwisata

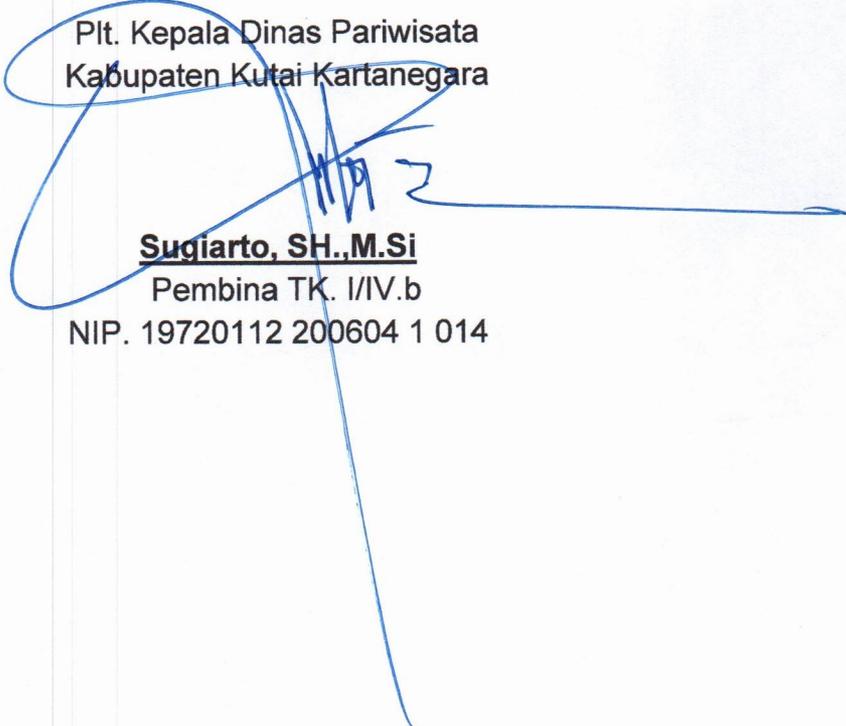
menyampaikan surat permohonan perbaikan kendaraan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK Kegiatan	Kepala Dinas Pariwisata
menyampaikan surat permohonan perbaikan kendaraan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK Kegiatan	Kepala Dinas Pariwisata
Menyampaikan surat permohonan perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK Kegiatan	Kepala Dinas Pariwisata

Keterangan.: (Warna Hijau rencana pelaksanaan).
(Warna Kuning Realisasi pelaksanaan)

BAB VII PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Pelaksanaan Penilaian Risiko Plt. Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Triwulan I Tahun 2024 disampaikan Kepada Bupati Kutai Kartanegara sebagai bahan masukan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan Urusan Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara

Plt. Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Kutai Kartanegara


Sugiarto, SH.,M.Si
Pembina TK. I/IV.b
NIP. 19720112 200604 1 014

BAB VII PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Pelaksanaan Penilaian Risiko Plt. Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Triwulan I Tahun 2024 disampaikan Kepada Bupati Kutai Kartanegara sebagai bahan masukan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan Urusan Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara

Plt. Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Kutai Kartanegara



Sugiarto, SH.,M.Si

Pembina TK. I/IV.b

NIP. 19720112 200604 1 014